

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Keprilakuan organisasi umumnya pada kajian ilmu perilaku itu sendiri yang dikembangkan oleh perilaku atau tingkah laku manusia itu sendiri dalam lingkungan organisasi. Dengan demikian maka teori perilaku organisasi mengandung dua komponen yaitu individu – individu yang berperilaku dan organisasi formal sebagai wadah dari perilaku tersebut. Jadi, perilaku organisasi adalah suatu studi yang menyangkut aspek – aspek tingkah laku manusia dalam organisasi atau suatu kelompok tertentu. Aspek – aspek tersebut yaitu pengaruh organisasi terhadap manusia dan pengaruh manusia terhadap organisasi.

Sistem akuntansi pemerintahan pada tingkat pemerintah yaitu diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan yaitu PMK No.59/PMK.6/205 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, maka system akuntansi pemerintah pada tingkat pemerintah daerah diatur dengan Permendagri No.59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah perubahan atas permendagri No. 13 tahun 2006 adalah pasal 232 yang isinya mengatur tentang Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah. Dengan demikian maka penerapan standar akuntansi pemerintahan dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah merupakan salah satu syarat dan pedoman bagi pemerintah agar dapat menghasilkan laporan keuangan daerah yang sesuai standart dan berkualitas.

Pemerintah selalu mengupayakan langkah – langkah pengelolaan keuangan daerah dengan baik untuk mencapai *Good Government Governance*. Maka, langkah yang dilakukan dengan berbagai peraturan dan Undang – undang pemerintah terus meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan profesionalitas dalam mengelola keuangan daerah. Dalam menterjemahkan tanggung jawab atas keuangan pemerintah memberikan dalam bentuk laporan keuangan.

Undang – undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU No.33 tahun 2004 tentang Pertimbangan Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan kewenangan yang cukup besar bagi daerah untuk mengelola sumber daya yang dimilikinya, selain mempunyai kewenangan pemerintah daerah mempunyai kewajiban melaporkan dan mempertanggung jawabkan pengelola sumber daya. Oleh karena itu system akuntansi menjadi tuntutan dan kebutuhan bagi tiap pemerintah daerah untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang jelas dan andal. Menurut Permendagri No. 13 tahun 2006 yang kini telah diperbaharui oleh Permendagri No.21

tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah meliputi serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggung jawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Daerah (APBD) yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. Proses akuntan tersebut akan didokumentasikan dalam bentuk buku jurnal dan buku besar dan jika diperlukan maka ditambah dengan buku besar pembantu, sehingga terlihat jelas bahwa sistem akuntansi sangat diperlukan dalam pengelolaan keuangan pemerintahan daerah.

Sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah lemah maka akan menyebabkan pengendalian internal menjadi lemah dan akhirnya laporan keuangan yang dihasilkan kurang andal dan kurang relevan dalam membuat keputusan. Kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah meliputi : *Validity*, informasi yang dihasilkan dalam sistem akuntansi yang digunakan memiliki kandungan akurasi yang tinggi. *Reliability*, informasi yang dihasilkan dalam sistem informasi adalah informasi yang dapat dipercaya. Efisien, melalui sistem informasi yang digunakan anggota organisasi dapat menghemat penggunaan biaya dan kegunaan SAKD selanjutnya adalah Efektif, melalui sistem informasi yang digunakan anggota organisasi dapat memanfaatkan waktu secara optimal.

Organisasi pada pemerintah daerah, sistem akuntansi pada organisasi pemerintahan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). SKPD selaku entitas akuntansi akan melaksanakan sistem akuntansi pemerintah daerah yang sekurang – kurangnya meliputi akuntansi aset tetap atau barang milik daerah dan prosedur akuntansi selain kas. SAKD (Sistem Akuntansi Keuangan Daerah) yang digunakan pada saat ini adalah system akuntansi yang mengacu pada kebijakan perundangan yaitu Permendagri No.13/2006 yang kemudian direvisi pada Permendagri No.59/2007 dan direvisi kembali pada Permendagri N0.21/2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuanagn Daerah. Pengembangan sistem tersebut memerlukan suatu perencanaan dan pengimplementasian yang hati – hati, untuk menghindari adanya penolakan terhadap sistem yang dikembangkan. Jika melihat suatu keberhasilan dalam mengimplementasi sistem tidak hanya ditentukan pada penguasaan teknis belaka, namun banyak dari penelitian menunjukkan bahwa factor perilaku dari individu pengguna sistem sangat menentukan kesuksesan implementasi. Agar dapat meningkatkan kegunaan SAKD maka diperlukan adanya factor perilaku dalam suatu organisasi yang mendukung dalam penerapan SAKD tersebut (Lyna Latifah dan Arifin Sabeni : 2007), diantaranya adanya kejelasan tujuan dari suatu

organisasi serta adanya dukungan atasan dalam penerapan system akuntansi keuangan daerah agar dapat meningkatkan kegunaan SAKD dalam memenuhi tuntutan masyarakat tentang transparansi dan akuntabilitas lembaga sektor publik, karena SAKD dapat berguna untuk mengelola dana secara transparan, ekonomis, efektif, efisien dan akuntabel.

Struktur organisasi di pemerintah daerah Kabupaten Jember menggunakan konsep transaksi Kantor Pusat – Kantor Cabang (*Home Office – Branch Office transaction* atau disingkat menjadi HOBO). Di Pemerintah Daerah Kabupaten Jember yang bertindak sebagai Kantor Pusat adalah PPKD (dalam hal ini adalah BPKAD Badan Pengelolaan Keuangan Daerah) dan yang bertindak sebagai kantor cabang adalah SKPD. Pemilihan struktur ini sesuai dengan Undang – undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 10 ayat (3) dan Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 100 yang menetapkan bahwa pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan dilakukan di tingkat SKPD sebagai entitas akuntansi dan pemerintah daerah sebagai entitas pelaporan. Sebagai konsekuensi dari dari struktur organisasi tersebut diperlukan kontrol pencatatan antara PPKD dan SKPD melalui mekanisme akun resiprokal (*reciprocal account*) yaitu akun Rekening Koran – Pusat (RK-Pusat) yang ada ada di SKPD dan akun Rekening Koran SKPD (RK-SKPD) yang ada di PPKD. Selain itu, sesuai dengan Permendagri No. 13 Tahun 2006 yang menegaskan bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran atau pengguna barang.

Menurut Tampubolon (2004) perilaku keorganisasian adalah studi mengenai perilaku manusia dalam organisasi yang sama dengan menggunakan ilmu pengetahuan tentang bagaimana manusia bertindak dalam organisasi. perilaku organisasi mendasar pada analisis terhadap manusia yang ditunjukkan bagi kemanfaatan orang. Sedangkan menurut Thoha (2002) perilaku organisasi adalah suatu studi yang menyangkut aspek – aspek tingkah laku manusia dalam suatu organisasi atau suatu kelompok tertentu.

Selain faktor teknis, beberapa penelitian menunjukkan bukti empiris bahwa factor organisasional seperti pelatihan, kejelasan tujuan serta dukungan atasan, berpengaruh positif terhadap implementasi suatu inovasi sistem maupun perubahan model akuntansi manajemen (Latifah dn Sabeni : 2007). (Shield : 1995) dalam (Latifah dan Sabeni : 2007) berpendapat bahwa pelatihan dalam desain, implementasi dan penggunaan suatu inovasi seperti adanya sistem baru memberikan kesempatan bagi organisasi untuk dapat mengartikulasikan hubungan antara implementasi sistem baru

dengan adanya tujuan organisasi serta menyediakan suatu sarana bagi pengguna untuk dapat mengerti, menerima dan merasa nyaman dari perasaan takut atau perasaan khawatir dalam proses implementasi.

Keakuratan laporan keuangan akan menghasilkan kejelasan tujuan. Kejelasan tujuan dapat menentukan suatu keberhasilan sistem karena individu dengan suatu kejelasan tujuan, target yang jelas dan memahami bagaimana mencapai tujuan, mereka dapat melaksanakan tugas dengan keterampilan dan kompetensi yang dimiliki (Latifah dan Sabeni : 2007).

Menurut (Cyntia : 2013) dukungan manajemen puncak (atasan) dalam suatu inovasi sangat penting dikarenakan adanya kekuasaan manajer terkait dengan sumber daya. Manajer (atasan) akan fokus terhadap sumber daya yang diperlukan, tujuan dan inisiatif strategi yang direncanakan apabila manajer (atasan) mendukung sepenuhnya dalam implementasi. Hal ini menunjukkan bahwa dalam pengimplementasian sistem baru, perlu dipertimbangkan faktor – faktor organisasional seperti komitmen dari sumber daya yang terlibat, dukungan atasan, kejelasan tujuan dan pelatihan. Manajer (atasan) dapat fokus terhadap sumber daya yang diperlukan, tujuan dan inisiatif strategi yang direncanakan apabila manajer (atasan) dapat mendukung sepenuhnya dalam melakukan implementasi.

Perilaku organisasi merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam organisasi dalam rangka mencapai tujuan organisasi (Kayati : 2016) dalam bukunya (Timotius : 2018). Penerapan SAKD merupakan bagian dari tujuan organisasi pemerintah daerah untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas dalam rangka pertanggung jawaban pelaksanaan APBD. Kejelasan tujuan dalam organisasi pemerintah dapat terlihat dari visi dan misi organisasi. Apabila kejelasan tujuan organisasi yang berupa pelaksanaan SAKD tidak dijalankan secara tepat dan didukung secara aktif oleh atasan, maka penerapan sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah tidak akan berguna karena kejelasan tujuan memperlihatkan transparansi didalam sebuah organisasi yang memperlihatkan alur yang harus dilalui atau dicapai seluruh anggota organisasi dalam bekerja. Kejelasan tujuan akan memperlihatkan keseriusan organisasi dalam mencapai tujuan organisasi.

Faktor perilaku dalam meningkatkan kegunaan dari penerapan SAKD adalah adanya dukungan atasan dalam organisasi, dukungan manajemen puncak (atasan) dalam suatu inovasi sangat penting dikarenakan adanya kekuasaan manajer dengan sumber daya (Andira : 2015). Atasan dapat fokus terhadap sumber daya yang diperlukan, tujuan, dan inisiatif strategi yang direncanakan apabila atasan mendukung sepenuhnya dalam melakukan implementasi.

Penelitian ini mereplikasi dari penelitian (Kayati : 2016) yang berjudul Pengaruh Faktor Kepriilaku Organisasi Terhadap Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah. Perbedaan dari penelitian adalah pada cakupan wilayah. Dibawah ini data dari angket yang diperoleh oleh penulis tentang pemahaman karyawan terhadap sistem akuntansi pemerintah daerah.

Tabel 1.1.

Data pemahaman karyawan terhadap sistem akuntansi keuangan daerah, pelatihan, kejelasan tujuan dan dukungan atasan

No	Keterangan	Mengerti (orang)	Kurang mengerti (orang)
1	Pengetahuan tentang sistem akuntansi pemerintah daerah	5	5
2	Tingkat kepuasan pelatihan	6	4
3	Tingkat pemahaman karyawan terhadap kejelasan tujuan	6	4
4	Tingkat pemahaman karyawan terhadap dukungan atasan	5	5

Sumber : Hasil survey pendahulu pada SKPD di Pemerintahan Kabupaten Jember

Tabel 1.2.

Berikut adalah hasil jawaban responden dari kuisisioner/angket yang diserahkan pada Pemerintahan Kabupaten Jember yang dapat dilihat dari beberapa variabel yaitu variabel terikat dan variabel bebas. Variabel terikat yaitu Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, variabel bebas yaitu pelatihan, kejelasan tujuan dan dukungan atasan.

Variabel terikat (Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD))	1. Laporan keuangan disusun oleh PPK-SKPD, laporan berupa LRA, Neraca, CALK	9	1
	2. Prosedur laporan keuangan tidak bertentangan dengan permendagri No. 71 Tahun 2010	10	
Variabel bebas (Pelatihan)	1. Pelatihan yang diberikan untuk meningkatkan pekerjaan telah diberikan cukup banyak jenis pelatihan	4	6
		8	2

	2. Fasilitas pelatihan yang diberikan sangat bagus 3. Jenis pelatihan yang diberikan sudah sesuai dengan yang diinginkan dan sesuai dengan pekerjaan	9	1
Variabel bebas (Kejelasan Tujuan)	1. Tujuan organisasi diberikan dengan jelas oleh pimpinan 2. Pencapaian tujuan dari setiap tugas selalu ditekan pada lembaga anda	9 7	1 3
Variabel bebas (Dukungan Atasan)	1. Atasan selalu memperhatikan problem yang anda hadapi 2. Semua dukungan dari atasan diterima semua oleh pegawai	4 8	6 2

Sumber : Hasil survey perdahulu di SKPD Jember

Dalam tabel diatas maka dapat disimpulkan bahwa dari beberapa karyawan masih membutuhkan peningkatan pelatihan agar dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas serta pemimpin kurang berkontribusi terhadap karyawan. sehingga karyawan yang mengetahui tentang kegunaan sistem akuntansi keuangan yang meliputi faktor tingkat kepuasan pelatihan, tingkat pemahaman karyawan terhadap kejelasan tujuan dan tingkat pemahaman karyawan terhadap dukungan atasan masih terbilang kurang. Sehingga disitu peneliti tertarik untuk meneliti kembali tentang Pengaruh Faktor Kepriilaku Organisasi Terhadap Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah. Dimana tempat yang dijadikan objek adalah pada kabupaten Jember, yang mempunyai masalah karyawan sebagian banyak tidak mengerti atau tidak paham mengenai kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah. Oleh karena itu peneliti melakukan sebuah replikasi penelitian yang telah dilakukan (Kayati : 2016). Alasan penulis mereplikasi dikarenakan ingin menguji kembali di Pemerintahan Kabupaten Jember. Perbedaan dari penelitian sekarang pada penelitian sebelumnya adalah pada lokasi penelitian.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul “ PENGARUH FAKTOR KEPRIILAKUAN ORGANISASI TERHADAP KEGUNAAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH” (Studi Empiris Pada Kabupaten Jember). Tujuan penelitian ini adalah ingin membuktikan secara empiris bahwa pengaruh pelatihan, kejelasan tujuan, dan dukungan atasan terhadap kegunaan SAKD di Kabupaten Jember.

1.2. Rumusan Masalah

Kurangnya kontribusi atasan terhadap karyawan dan pelatihan terhadap karyawan terhadap sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah sehingga karyawan belum maksimal dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

1.3. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis dapat mengambil rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah berpengaruh positif pelatihan terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah?
2. Apakah berpengaruh positif kejelasan tujuan terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah?
3. Apakah berpengaruh positif dukungan atasan terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah disampaikan di atas, tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah pelatihan berpengaruh positif terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah.
2. Untuk mengetahui apakah kejelasan tujuan berpengaruh positif terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah.
3. Untuk mengetahui apakah dukungan atasan berpengaruh positif terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah.

1.5. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang dapat diambil adalah sebagai berikut :

1.5.1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini memberikan pemikiran untuk meningkatkan kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah yang sudah dituangkan dalam peraturan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah harus transparansi, efektif. Efisien dan akuntabilitas dan konsep – konsep tentang pelatihan, kejelasan tujuan dan dukungan atasan sebagai dukungan dalam peningkatan kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah di Kabupaten Jember.

1.5.2. Manfaat Praktis

Adapun secara praktis manfaat dari hasil penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat bagi peneliti

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai wahana pengembangan ilmu pengetahuan melalui penelitian dengan mengaplikasikan teori yang sudah didapat selama studi di perguruan tinggi.

2. Manfaat bagi pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan mengenai Sistem Akuntansi Keuangan Daerah yang saat itu ditetapkan.

3. Manfaat bagi praktisi Akuntansi Sektor Publik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan dan masukan dalam mengembangkan profesinya disektor publik.

4. Manfaat bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan serta dijadikan referensi dalam penelitian – penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pengaruh faktor keperilakuan organisasi terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah.

1.5.3. Manfaat bagi pembaca

Dapat menjadi sumber informasi dan bahan masukan yang dapat digunakan dalam penelitian selanjutnya.